# Rencana Kerja

# RENJA 2025

Dinas Perhubungan

**Kota Bandung** 







# Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rakhmat dan karunia – Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja dinas untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung.

Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.





# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

encana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Sebagai sebuah dokumen resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menjadi satu kesatuan untuk



mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

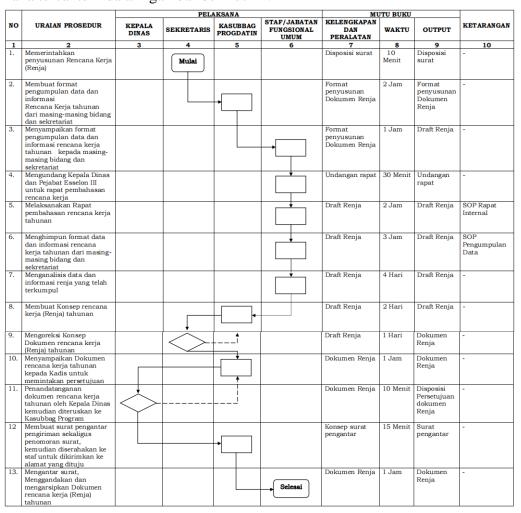
- Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2 Renja merupakan acuan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- 3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja PD pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung menyusun Renja Dinas Perhubungan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Perhubungan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2025 dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.



Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja PD (Renja PD)

Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah
sebagimana tercantum dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alir Penyusunan Renja PD

#### Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung sampai dengan bulan Juli 2024 memiliki pegawai sebanyak 254 orang. Adapun kondisi kepegawaian berdasarkan eselon jabatan:

Kondisi KepegawaianBerdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian                | Eselon II<br>B | Eselon III<br>A | Eselon III<br>B | Eselon IV<br>A | Eselon IV<br>B | Jlh |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 1  | Plt. Kepala Dinas     |                |                 | 1               |                |                | 1   |
| 2  | Plt. Sekretaris       |                |                 | 1               |                |                | 1   |
| 3  | Kepala Bidang         |                |                 | 4               |                |                | 4   |
| 4  | Kasubbag/Kasie/Ka UPT |                |                 |                 | 12             |                | 12  |
| 5  | Kasubbag TU UPT       |                |                 |                 |                | 3              | 3   |
|    | JUMLAH                |                |                 | 6               | 12             | 3              | 21  |



Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub

Pegawai eselon III sebanyak 6 orang yaitu Plt. Kepala Dinas, Plt. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi dan pegawai eselon IV sebanyak 15 orang yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubag Program Data dan Informasi, Kasi Lalu Lintas Jalan, Kasi Perlengkapan Jalan, Kasie Manajemen Angkutan, Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kasi Alat Penerangan Jalan, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasi Ketertiban Transportasi, Kasi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan, Plt. Kepala UPT Pengelolaan Terminal, Kepala UPT Angkutan, Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran, Kasubbag TU UPT Pengelolaan Terminal, Kasubbag TU UPT Angkutan dan Kasubbag TU UPT Pengelolaan Perparkiran. Pelaksana sebanyak 235 orang.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Ura               | S3     | S2   | S1/   | D1-  | SLTA  | SLTP | SD   | Jlh  |
|----|-------------------|--------|------|-------|------|-------|------|------|------|
|    | ian               |        |      | D4    | D3   |       |      |      |      |
| 1  | Plt. Kepala Dinas |        | 1    |       |      |       |      |      | 1    |
| 2  | Plt. Sekretaris   |        | 1    |       |      |       |      |      | 1    |
| 3  | Kepala Bidang     |        | 4    |       |      |       |      |      | 4    |
| 4  | Kasubbag          |        | 1    | 2     |      |       |      |      | 3    |
| 5  | Kepala Seksi      |        | 2    | 5     |      |       |      |      | 7    |
| 6  | Kepala UPT        |        | 1    | 1     |      |       |      |      | 2    |
| 7  | Kasubbag TU UPT   |        | 1    | 2     |      |       |      |      | 3    |
| 8  | Pelaksana         |        | 10   | 113   | 12   | 90    | 7    | 3    | 233  |
|    | JUMLAH            | JUMLAH | 21   | 123   | 12   | 90    | 7    | 3    | 254  |
|    | %                 |        | 8,3% | 48,4% | 4,7% | 35,4% | 2,8% | 1,2% | 100% |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Bandung



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung, sebanyak 21 orang (8,3%) memiliki pendidikan S2, yaitu Plt Kepala Dinas, Plt Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbag, 2 orang Kepala Seksi, 1 orang Ka UPT, 1 orang Kasubbag TU UPT dan 10 orang Pelaksana, sedangkan sebanyak 123 orang (48,4%) memiliki pendidikan S1/D4, yaitu 2 orang Kasubbag, 5 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala UPT, 2 orang Kasubag TU UPT dan 113 orang pelaksana. Pegawai yang memiliki pendidikan D1- D3 sebanyak 12 orang pelaksana (4,7%), untuk pegawai lulusan SLTA 90 orang (35,4%), Lulusan SLTP 7 orang (2,8%), lulusan SD 3 orang (1,2%).

Dinas Perhubungan Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Sebagai bagian dari unsur pelaksana Pemerintah Daerah, secara struktural Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Adapun kondisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung secara umumnya dapat dilihat dalam Stuktur Organisasi berikut ini:



#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Lampiran:

Tanggal:



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1. Sekretariat, membawahi:
  - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b). Sub Bagian Keuangan
  - c). Sub Bagian Program data dan Informasi
- 2. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi:
  - a). Seksi Lalu Lintas Jalan.
  - b). Seksi Perlengkapan Jalan.
- 3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi:
  - a). Seksi Manajemen Angkutan.
  - b). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.



- 4. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:
  - a). Seksi Alat Penerangan Jalan.
  - b). Seksi Sarana dan Prasarana.
- 5. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi:
  - a). Seksi Ketertiban Transportasi.
  - b). Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan.
- 6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PD;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- i. Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –2025.
- k. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 ini, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

#### b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025 ini mempunyai tujuan sebagai berikut :



- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dapat tercapai;
- 2 Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
- 4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

#### • Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Perhubungan Kota Bandung dua tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja APBD sudah disahkan.



- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
   Bab ini membahas telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja
   Dinas Perhubungan Kota Bandung
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   Bab ini membahas Program dan Kegiatan serta pendanaannya.
- Bab V Penutup

  Bab ini memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



# **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023**

# 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

encapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 disajikan dalam

tabel 2.1 berikut ini:

|      | Kode   |     |    | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja<br>Program (out<br>come) / kegiatan<br>(out put) | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program | Program dan  Target  Renja PD | n realisasi kine<br>Kegiatan Tahu<br>Realisasi<br>Renja PD |                   | Target<br>program<br>dan<br>kegiatan<br>(Renja PD<br>tahun | Perkiraan r<br>capaian targe<br>PD s/d tahur<br>Realisasi<br>Capaian<br>Program<br>dan | et Renstra<br>n berjalan<br>Target<br>Capaia<br>n |
|------|--------|-----|----|--|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------|--|--|---|
|      | 1<br>2 |     |    |  | (out put)  | Tahun 2026  | dan<br>Keluaran<br>kegiatan<br>s/d tahun<br>2022   | tahun<br>2023                 | tahun<br>2023  | realisa<br>si (%) | 2024)  | Kegiatan<br>s/d tahun<br>2024  | Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%)            |
|      | 1      |     |    | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             | 7  | 8=(7)/(6)         | 9  | 10=5+7+9   | 11=10/4   |
| 2    |        |     |    | Urusan Wajib bukan<br>pelayanan dasar  |  |   |  |                               |  |                   |  |  |   |
| 2.15 |        |     |    | Urusan Wajib<br>Perhubungan  |  |   |  |                               |  |                   |  |  |   |
| 2.15 | 01     |     |    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA               | Cakupan pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran (%)               | 100%  | -  | -                             | -  | -                 | 100%   | 100%   | 33.33%  |
| 2.15 | 01     | 201 |    | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi<br>Kinerja PD                                     | 15 dokumen  | -  | -                             | -  | -                 | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 33.33%  |
| 2.15 | 01     | 201 | 01 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah<br>dokumen<br>capaian kinerja                               | 15 dokumen  | -  | -                             | -  | -                 | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 33.33%  |
| 2.15 | 01     | 202 |    | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | Laporan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                    | 36 Iaporan  | -  | -                             | -  | -                 | 12 laporan   | 12 laporan   | 33.33%  |
| 2.15 | 01     | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Laporan<br>penyediaan gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                 | 36 laporan  | -  | -                             | -  | -                 | 12 laporan   | 12 laporan   | 33.33%  |

| 2.15 | 01 | 205 |    | Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah               | Laporan<br>administrasi<br>kepegawaian<br>Perangkat Daerah        | 36 Laporan | - | - | - | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 33.33% |
|------|----|-----|----|--|---|------------|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| 2.15 | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Tersedianya PDH<br>berikut atributnya                             | 9 paket    | - | - | - | - | 3 paket    | 3 paket    | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah aparatur yang<br>mengikuti diklat                          | 450 orang  | - | - | - | - | 150 orang  | 150 orang  | 33.33% |
|      |    |     |    |  |   |            |   |   |   |   |            |            |        |
| 2.15 | 01 | 206 |    | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                         | Laporan penyediaan<br>administrasi<br>umum perangkat<br>daerah    | 36 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan    | 3 paket    | - | - | - | - | 1 paket    | 1 paket    | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Tersedianya peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor               | 36 paket   | - | - | - | - | 12 paket   | 12 paket   | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah laporan<br>penyediaan bahan<br>logistik kantor             | 36 paket   | - | - | - | - | 12 paket   | 12 paket   | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                           | Jumlah laporan<br>penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan | 9 paket    | - | - | - | - | 3 paket    | 3 paket    | 33.33% |



| 2.15 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang- Undangan                   | Jumlah laporan<br>penyediaan Bahan<br>Bacaan Dan<br>Peratuan<br>Perundang-<br>Undangan | 36<br>dokumen | - | - | - | - | 12 dokumen | 12 dokumen | 33.33% |
|------|----|-----|----|---|--|---------------|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| 2.15 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi                             | Jumlah laporan<br>penyelenggaraan<br>perjalanan dinas                                  | 36 Iaporan    | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 207 |    | Kegatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Laporan Pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah              | 36 Iaporan    | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 207 | 02 | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                         | Tersedianya<br>kendaraan dinas<br>/ operasional  | 15 unit       | - | - | - | - | 3 unit     | 3 unit     | 20%    |
| 2.15 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel   | Tersedianya<br>Mebeulair Dinas   | 9 paket       | - | - | - | - | 3 paket    | 3 paket    | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 208 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Laporan penyediaan<br>jasa penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah                    | 36 laporan    | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |

| 2.15 | 01 | 208 | 01 | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat   | Jumlah laporan<br>penyediaan jasa surat<br>menyurat   | 36 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
|------|----|-----|----|---|---|------------|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| 2.15 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan<br>penyediaan jasa<br>Komunikasi, Air Dan<br>Listrik   | 36 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan<br>penyediaan jasa<br>pelayanan umum<br>kantor   | 36 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 209 |    | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Laporan pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintah<br>daerah                         | 36 Iaporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 462 unit   | - | - | - | - | 139 unit   | 139 unit   | 33.33% |
| 2.15 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor<br>yang dipelihara   | 9 unit     | - | - | - | - | 4 unit     | 4 unit     | 44.44% |



| 2.15 | 01 | 209  | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah laporan<br>pemeliharaan<br>sarpras kantor                        | 783 unit     | - | - | - | - | 251 unit     | 251 unit     | 32.06  |
|------|----|------|----|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------|
|      |    |      |    |   |   |              |   |   |   |   |              |              |        |
| 2.15 | 01 | 210  |    | Kegiatan Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan    | 2 unit kerja | - | - | - | - | 2 unit kerja | 2 unit kerja | 100%   |
| 2.15 | 01 | 210  | 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD (Parkir)  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan    | 1 unit kerja | - | - | - | - | 1 unit kerja | 1 unit kerja | 100%   |
| 2.15 | 01 | 210  | 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD (Angkutan)  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan | 1 unit kerja | - | - | - | - | 1 unit kerja | 1 unit kerja | 100%   |
|      |    |      |    |   |   |              |   |   |   |   |              |              |        |
| 2.15 | 02 |      |    | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN LALU<br>LINTAS DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ)                                | Persentase Penurunan<br>aspek Penyebab Kemacetan<br>Urusan Perhubungan  | 4.22%        | 1 | - | - | - | 7.58%        | 7.58%        | 20.38% |
|      |    |      |    |   | Persentase peningkatan<br>Pengguna Angkutan Umum                        | 22.235%      | - | - | - | - | 21,735%      | 21,735%      | 97.25% |
| 2.15 | 02 | 2.01 |    | Kegiatan Penetapan Rencana<br>Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi                           | 96 dokumen   | - | - | - | - | 11 dokumen   | 11 dokumen   | 11.45% |
| 2.15 | 02 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                               | Dokumen Perencanaan<br>dan pengukuran<br>kinerja                        | 96 dokumen   | - | - | - | - | 11 dokumen   | 11 dokumen   | 11.45% |
|      |    |      |    |   |   |              |   |   |   |   |              |              |        |

| 2.15 | 02 | 2.02 |    | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Persentase perlengkapan<br>jalan yang dibangun  | 2535 unit | - | - | - | - | 2321 unit | 2321 unit | 91.5%  |
|------|----|------|----|--|---|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|--------|
| 2.15 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah prasarana jalan<br>yang terbangun  | 1635 unit | - | - | - | - | 165 unit  | 165 unit  | 10.10% |
| 2.15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah perlengkapan<br>jalan yang dibangun  | 900 unit  | - | - | - | - | 250 unit  | 250 unit  | 27.78% |
| 2.15 | 02 | 2.02 | 03 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan  | Prasarana jalan yang<br>dipelihara  | 7406 unit | - | - | - | - | 2156 unit | 2156 unit | 29.11% |
| 2.15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan  | perlengkapan jalan<br>yang dipelihara   | 411 titik | - | - | - | - | 137 titik | 137 titik | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.03 |    | Kegiatan Pengelolaan Terminal<br>Penumpang Tipe<br>C   | Jumlah Terminal<br>penumpang tipe C<br>yang dikelola  | 30 lokasi | - | - | - | - | 10 lokasi | 10 lokasi | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.03 | 03 | Pembangunan Terminal<br>Penumpang Tipe C yang<br>dilengkapi Fasilitas Utama dan<br>Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 9 unit    | - | - | - | - | 3 unit    | 3 unit    | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.03 | 04 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Terminal<br>(Fasilitas Utama dan<br>Pendukung)                        | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara            | 30 unit   | - | - | - | - | 10 unit   | 10 unit   | 33.33% |

Renja Dishub 2023

| 2.15 | 02 | 2.05 |    | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan yang diuji   | 201000<br>unit | - | - | - | - | 66000 unit | 66000 unit | 32.84% |
|------|----|------|----|---|---|----------------|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| 2.15 | 02 | 2.05 | 01 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                  | Jumlah sarana prasarana<br>pengujian kendaraan<br>bermotor yang tersedia                              | 8 set          | - | - | - | - | 1 set      | 1 set      | 12.5%  |
| 2.15 | 02 | 2.05 | 03 | Registrasi Kendaraan Wajib<br>Uji Berkala Kendaraan<br>Bermotor                             | Jumlah Kendaraan Wajib<br>Uji Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Terdaftar                            | 18 kali        | - | - | - | - | 6 kali     | 6 kali     | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                       | Jumlah Dokumen Bukti Lulus<br>Uji Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor                             | 201000<br>unit | - | - | - | - | 66000 unit | 66000 unit | 32.84% |
| 2.15 | 02 | 2.05 | 05 | Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor      | Jumlah Laporan Sosialisasi<br>Standar Operasional<br>Prosedur Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | 12<br>laporan  | - | - | - | - | 4 laporan  | 4 laporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                | Jumlah kendaraan bermotor<br>yang diuji   | 15 set         | - | - | - | - | 5 set      | 5 set      | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.06 |    | Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan<br>pengaturan lalu lintas   | 12<br>Iaporan  | - | - | - | - | 4 laporan  | 4 Iaporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.06 | 01 | Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten /<br>Kota  | Laporan penataan<br>manajemen dan rekayasa lalu<br>lintas   | 12<br>Iaporan  | - | - | - | - | 4 laporan  | 4 laporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan,<br>Perbaikan dan Pemeliharaan  | Laporan pengaturan lalu<br>lintas   | 36<br>Iaporan  | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |

|      |    |      |    | Perlengkapan Jalan dalam Rangka<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas  |  |            |   |   |   |   |            |            |        |
|------|----|------|----|---|--|------------|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| 2.15 | 02 | 2.06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan<br>Jalan Kabupaten/Kota  | Laporan Forum LLAJ<br>kota   | 12 laporan | - | - | - | - | 4 laporan  | 4 laporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.08 |    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di<br>Jalan   | Laporan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya                           | 12 Iaporan | - | - | - | - | 4 Iaporan  | 4 Iaporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.08 | 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan<br>Pemantauan Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan Kompetensi<br>Pengemudi Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kampanye<br>publik  | 12 Iaporan | - | - | - | - | 4 Iaporan  | 4 laporan  | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.08 | 05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan<br>Pemantauan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan Angkutan<br>Umum   | Jumlah laporan<br>penertiban<br>angkutan di jalan<br>raya                                    | 36 Iaporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 33.33% |
| 2.15 | 02 | 2.09 |    | Penyediaan Angkutan Umum untuk<br>Jasa Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota                         | Pengoperasian dan Pemeliharaan Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB),dan Bus Sekolah | 9 koridor  | - | - | - | - | 9 koridor  | 9 Koridor  | 100%   |

Renja Dishub 2023



| 2.15 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar<br>Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                             | 28 unit    | - | - | - | - | 28 unit   | 28 unit   | 100%   |
|------|----|------|----|---|--|------------|---|---|---|---|-----------|-----------|--------|
| 2.15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 laporan | - | - | - | - | 4 laporan | 4 laporan | 33.33% |

# Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung s/d Tahun 2024



Dinas Perhubungan Kota Bandung akan tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan selanjutnya. Hal tersebut akan terus dilakukan sebagai upaya untuk tercapainya sinergitas antar stake holder. Setiap perkembangan yang terjadi akan terus dipantau dan diselaraskan dengan kondisi yang ada sehingga lambat laun akan tercapai sistem transportasi yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai lembaga teknis dalam bidang perhubungan, dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas sarana prasana transportasi di Kota Bandung yang memadai, mampu memberikan pelayanan yang aman dan lancar bagi masyarakat di Kota Bandung pada umumnya sehingga secara aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota Bandung (welfare state).

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan



diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan dalam penyediaan fasilitas perhubungan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perhubungan dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai beberapa indikator sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan capaian kinerja yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bagian keenam, yang membahas tentang pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang selanjutnya kewenangan pemerintah daerah tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.



# 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis. Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sangat strategis yaitu pelayanan di bidang transportasi yang meliputi masalah lalu lintas, parkir, angkutan, terminal, operasional petugas dan pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak lepas dari berbagai persoalan/masalah yang membutuhkan perhatian cukup serius. Diantaranya adalah masalah penanggulangan kemacetan yang dirasakan cukup signifikas di beberap ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk baikpada hari kerja maupun pada saat hari libur (kususnya pada saat *long week end*).

Penanganan kemacetan di Kota Bandung cukup memberikan dampak pada pencapaian Kepala Daerah Kota Bandung termasuk diantaranya Bandung bebas Macet. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka bertambah pula emisi gas buang carbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Hal tersebut cukup memberikan dampak pada kondisi udara bersih di Kota Bandung. Selain itu kemacetan pun berdampak pada pemborosan BBM yang dipakai kendaraan bermotor.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung khususnya di bidang transportasi melahirkan suatu tantangan dan juga peluang tersendiri. Diantara tantangan yang dihadapi adalah upaya pemecahan masalah kemacetan di tengah meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak berimbang dengan penambahan kapasitas jalan. Tantangan ini menjadi peluang tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan untuk mengoperasikan angkutan umum massal yang mana hal ini diharapkan bisa menekan penggunaan



kendaraan pribadi untuk kembali beralih menggunakan sarana transportasi umum.

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila pengoperasian angkutan umum massal menjadi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang direncanakan dalam perumusan program maupun kegiatan prioritas yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengoperasikan masing-masing 10 bus di 5 koridor yang melayani jalur Cibiru — Cibeureum via Soekarno Hatta, jalur Cicaheum — Cibeureum via jalur tengah, Sarijadi — Cicaheum dan Antapani — Leuwi Panjang dan Antapani — St Hall. Adapun data jumlah penumpang dari 5 koridor yaitu diantaranya:

Tabel 2.3 Jumlah Penumpang Trans Metro Bandung Tahun 2023

| Jur     | nlah Penump | oang Trans M | letro Bandui | ng     |         |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------|---------|
| Koridor | Total       |              |              |        |         |
| 1       | 2           | 3            | 4            | 5      |         |
| 299.381 | 287.517     | 51.471       | 38.121       | 22.381 | 698.871 |

Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 10 bus di 5 koridor dengan jumlah penumpang yang berbeda-beda di setiap masing-masing koridornya. Koridor 1 sebanyak 299.381 penumpang, Koridor 2 sebanyak 287.517, Koridor 3 sebanyak 51.471, Koridor 4 sebanyak 38.121 penumpang, dan di Koridor 5 sebanyak 22.381 penumpang. Sehingga dari total 5 koridor berjumlah 698.871 penumpang.

Dalam upaya untuk mengurangi kemacetan Dinas Perhubungan Kota Bandung pada Tahun 2025 mempunyai delapan titik kemacetan yang dibagi kedalam ruas jalan yang harus di selesaikan yaitu di antaranya:

 Jalan Terusan Buah Batu (SP.4 SOEKARNO HATTA - BTS. KOTA/KAB. BANDUNG)

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 2,260 KM, dengan *Level of Service (LOS)* di level D, V/C rasio sebesar 0,82 dan kecepatan 15,98 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu ngetem angkutan umum yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu pasar tumpah, dan volume lalu lintas yang tinggi.



#### 2. Jalan Jenderal Sudirman

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 4.350 KM , Level of Service (LOS) di level D, V/C rasio sebesar 0,8 dan kecepatan 17,56 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu disiplin pengguna angkutan umum yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan, aksesibiltas keluar masuk area pertokoan / pendidikan, dan volume lalu lintas yang tinggi.

#### 3. Jalan Ahmad Yani

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 4.765 KM, *Level of Service* (*LOS*) di level D, V/C rasio sebesar 0,80 dan kecepatan 17,89 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu disiplin pengguna angkutan umum yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas keluar masuk area pertokoan / pendidikan, perlintasan sebidang KA dan volume lalu lintas yang tinggi.

#### 4. Jalan Cihampelas

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 2.555 KM, Level of Service (LOS) di level D, V/C rasio sebesar 0,81 dan kecepatan 15,21 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu penyeberang jalan dan pejalan kaki yang tidak pada tempatnya yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan, aksesibiltas keluar masuk area pertokoan / pendidikan, pedagang kaki lima, dan volume lalu lintas yang tinggi.

#### 5. Jalan H.Ibrahim Aji

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 4.675 KM, Level of Service (LOS) di level D, V/C rasio sebesar 0,85 dan kecepatan 18,11 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu pengguna angkutan umum yang tidak disiplin yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan, kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik, dan volume lalu lintas yang tinggi.



#### 6. Jalan Raya Gunung Batu

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 1.719 KM, *Level of Service* (*LOS*) di level D, V/C rasio sebesar 0,84 dan kecepatan 16,54 km/jam. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu pengguna angkutan umum yang tidak disiplin yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan dan pola pergerakan commuter.

#### 7. Jalan ABC

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 0.605 KM, Level of Service (LOS) di level E, V/C rasio sebesar 0,91 dan kecepatan 13,42 km/jam. Terdapat satu hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu parkir liar on the street dan penyebrang jalan serta pejalan kaki yang tidak pada tempatnya yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan ada tiga hambatan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan, aksesibiltas keluar masuk area pertokoan / pendidikan, dan pedagang kaki lima.

#### 8. Jalan Cibaduyut

Jalan tersebut memiliki panjang jalan sebesar 1.680 KM, Level of Service (LOS) di level D, V/C rasio sebesar 0,84 dan kecepatan 18,72 km/jam. Terdapat satu hambatan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut yaitu ngetem angkutan umum dan parkir liar on the street yang termasuk ke dalam urusan perhubungan, dan ada tiga hambatan yang termasuk urusan non perhubungannya yaitu aksesibiltas gang / jalan, aksesibiltas keluar masuk area pertokoan / pendidikan, banjir/genangan, kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik, pola pergerakan commuter dan volume lalu lintas yang tinggi.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mengetahui kesinergian dan kesesuaian dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu proses yang akan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Proses tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana rumusan program dan kegiatan sudah terakomodir pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2025 ataukan besarannya sudah cocok atau sesuai. Hasil review selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:



# Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Bandung

Nama PD: Dinas Perhubungan Kota Bandung

|     |  | F           | Rancangan Awal RKPD                                    |                   |                     | Hasil An   | Hasil Analisa Kebutuhan |  |                       |                        |                |
|-----|--|-------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| No  | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan   | Loka<br>si  | Indikator Kinerja                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan   | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                      | Target<br>Capaia<br>n | Kebutuhan Dana<br>(Rp) | Cat<br>Penting |
| (1) | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               | (6)                 | (7)  | (8)                     | (9)  | (10)                  | (11)                   | (12)           |
| A   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA               | Kota<br>Bdg | Persentase Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran    | 100%              | 112.383.146.324     | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA               | Kota                    | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran | 100%                  | 99.359.964.652         |                |
| 1   | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |             | Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah           | 5 Laporan         | 450.000.000         | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat Daerah |                         | Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah        | 5 Laporan             | 450.000.000            |                |
| 1.1 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   |             | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 5 Laporan         | 450.000.000         | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   |                         | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 5 Laporan             | 450.000.000            |                |
|     |  |             | l  |                   | l                   |  |                         | 1  | 1                     |                        | 1              |

| 2   | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | Laporan<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN   | 12 Laporan         | 45.546.840.093 | Kegiatan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah               | Laporan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN  | 12 Laporan         | 43.664.950.785 |
|-----|--|--|--------------------|----------------|--|---|--------------------|----------------|
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | 268<br>orang/bulan | 45.546.840.093 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | 260<br>orang/bulan | 43.664.950.785 |
|     |  |  |                    |                |  |   |                    |                |
| 3   | Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah               | Laporan administrasi<br>kepegawaian Perangkat<br>Daerah  | 12 Laporan         | 1.396.969.496  | Kegiatan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah            | Laporan administrasi<br>kepegawaian Perangkat<br>Daerah   | 12 Laporan         | 1.891.908.354  |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                       | 3 paket            | 683.070.776    | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                    | 3 paket            | 555.290.254    |
| 3.2 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 320 orang          | 713.898.720    | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan | 250 orang          | 1.336.618.100  |
| 4   | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                         | Laporan penyediaan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah  | 12 laporan         | 5.031.804.124  | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                      | Laporan penyediaan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah                                     | 12 laporan         | 4.334.940.835  |

| 4.1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 2 paket       | 164.831.535   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 2 paket    | 149.846.850   |
|-----|--|--|---------------|---------------|---|--|------------|---------------|
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                        | 10 paket      | 2.760.676.094 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           | 4 paket    | 2.392.342.937 |
| 4.3 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 12 paket      | 923.245.620   | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 12 paket   | 839.314.200   |
| 4.4 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 3 paket       | 347.398.235   | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                              | 3 paket    | 324.671.248   |
| 4.5 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan          | 12<br>dokumen | 267.715.200   | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan   | 12 dokumen | 223.096.000   |
| 4.6 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   | 12 laporan    | 567.937.440   | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   | 12 laporan | 405.669.600   |
| 5   | Kegiatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Laporan Pengadaaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>Pemerintah daerah             | 12 laporan    | 952.449.333   | Kegiatan Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Laporan Pengadaaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>Pemerintah daerah             | 12 laporan | 621.947.358   |



| 5.1 | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                  | 6 unit     | 205.128.000   | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                  | 3 unit     | 68.376.000    |
|-----|--|--|------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 5.2 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan  | 3 paket    | 747.321.333   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan  | 3 paket    | 553.571.358   |
| 6   | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  | Laporan penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah   | 12 laporan | 8.934.249.326 | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah   | Laporan penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah   | 12 laporan | 7.870.146.778 |
| 6.1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat   | 12 laporan | 17.000.000    | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | 12 laporan | 9.300.000     |
| 6.2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 12 laporan | 3.421.387.938 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan                 | 12 laporan | 2.881.836.875 |
| 6.3 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   | 12 laporan | 5.495.861.388 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      | 12 laporan | 4.979.009.903 |
| 7   | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  | Laporan pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                               | 12 laporan | 7.562.906.966 | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  | Laporan pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                               | 12 laporan | 6.120.999.177 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 154 unit   | 5.691.131.650 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 154 unit   | 4.552.905.302 |



| 7.2 | Pemeliharaan/Rehabilita si<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 3 unit       | 1.235.315.480  | Pemeliharaan/Rehabil itasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 3 unit       | 1.037.710.660  |
|-----|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 7.3 | Pemeliharaan/Rehabilita si<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 261 unit     | 636.459.836    | Pemeliharaan/Rehabil itasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 261 unit     | 530.383.197    |
| 8   | Kogiatan Boningkatan   |  |              |                |  |  |              |                |
| 0   | Kegiatan Peningkatan<br>Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan  | 2 unit kerja | 42.507.926.986 | Kegiatan<br>Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 2 unit kerja | 34.405.071.365 |
| 8.1 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD (Parkir)   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan  | 1 unit kerja | 8.102.855.620  | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD (Parkir)   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 1 unit kerja | 7.000.000.000  |
| 8.2 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD<br>(Angkutan)  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan  | 1 unit kerja | 34.405.071.366 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD<br>(Angkutan)  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 1 unit kerja | 27.405.071.365 |



| В    | PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)          | Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan                 | 6,34%      |                | PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)             | Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan                       | 6,34%         | 164.290.124.407 |
|------|---|--|------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|
|      |   | Persentase<br>peningkatan<br>Pengguna<br>Angkutan Umum                           | 21,985%    |                |  | Persentase<br>peningkatan<br>Pengguna<br>Angkutan Umum                                 | 21,985%       |                 |
| 9    | Kegiatan Penetapan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Evauasi                                     | 36 dokumen | 5.386.577.401  | Kegiatan Penetapan<br>Rencana Induk Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota        | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>dan Evauasi  | 16<br>dokumen | 3.759.331.220   |
| 9.1  | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>penyelenggaraan dan<br>pengukuan kinerja<br>bidang perhubungan | 36 dokumen | 5.386.577.401  | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>penyelenggaraan<br>dan<br>pengukuan kinerja<br>bidang<br>perhubungan | 16<br>dokumen | 3.759.331.220   |
| 10   | Kegiatan Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota    | Jumlah perlengkapan<br>jalan dan prasarana<br>jalan yang tersedia                | 3.115 unit | 52.375.252.857 | Kegiatan Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota    | Jumlah<br>perlengkapan jalan<br>dan prasarana jalan<br>yang tersedia                   | 6.776 unit    | 105.268.835.329 |
| 10.1 | Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota               | Jumlah Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun           | 615 unit   | 10.939.075.353 | Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                  | Jumlah<br>Prasarana Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun              | 4.616 unit    | 60.611.490.454  |

| 10.2 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                     | Jumlah Perlengkapan Jalan<br>di Jalan Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia                                  |              | 10.309.129.342 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                     | Jumlah Perlengkapan Jalan<br>di Jalan Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia                                  | 2.160 unit | 14.748.218.908 |
|------|---|--|--------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 10.3 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan                             | Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara                                    | 2500<br>unit | 25.114.000.000 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana Jalan                             | Jumlah Prasarana Jalan<br>yang Terehabilitasi dan<br>Terpelihara                                       | 27 unit    | 23.896.077.805 |
| 10.4 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan                          | Jumlah Perlengkapan Jalan<br>yang Terehabilitasi dan<br>Terpelihara                                    | 137 unit     | 6.013.048.162  | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan                          | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang Terehabilitasi<br>dan Terpelihara                                    | 146 unit   | 6.013.048.162  |
| 11   | Kegiatan Pengelolaan  | Jumlah Terminal  |              |                | Kegiatan Pengelolaan  | Jumlah Terminal  |            |                |
| 11   | Terminal Penumpang Tipe<br>C  | penumpang tipe C yang dikelola (lokasi)  | 12 unit      | 8.351.700.000  | Terminal Penumpang Tipe<br>C  | penumpang tipe C yang<br>dikelola (lokasi)   | 9 unit     | 7.000.000.000  |
| 11.1 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Terminal<br>(Fasilitas Utama dan<br>Pendukung) | Jumlah Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama<br>dan Pendukung) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara | 12 unit      | 8.351.700.000  | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Terminal<br>(Fasilitas Utama dan<br>Pendukung) | Jumlah Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama<br>dan Pendukung) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara | 9 unit     | 7.000.000.000  |
|      |   |  |              |                |   |  |            |                |

| 12   | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor  | Jumlah Kendaraan<br>yang diuji   | 66.000<br>unit      | 14.368.967.254 | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor  | Jumlah<br>Kendaraan<br>yang diuji  | 66.000 unit         | 8.255.280.007 |  |
|------|--|--|---------------------|----------------|--|--|---------------------|---------------|--|
| 12.1 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor          | Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                           | 4 set               | 5.811.889.926  | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor          | Jumlah sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia                  | 4 set               | 772.988.994   |  |
| 12.2 | Registrasi Kendaraan Wajib<br>Uji Berkala Kendaraan<br>Bermotor                        | Jumlah uji emisi gas<br>buang kendaraan<br>bermotor  | 6 kali              | 102.852.250    | Registrasi Kendaraan<br>Wajib Uji Berkala<br>Kendaraan Bermotor                        | Jumlah uji emisi<br>gas buang<br>kendaraan<br>bermotor   | 6 kali              | 86.648.905    |  |
| 12.3 | Penyediaan Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                  | Jumlah kendaraan<br>wajib uji  | 66.000<br>kendaraan | 5.172.480.857  | Penyediaan Bukti Lulus<br>Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                  | Jumlah<br>kendaraan<br>wajib uji   | 66.000<br>kendaraan | 4.452.539.730 |  |
| 12.4 | Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan<br>Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | 3 laporan           | 2.432.302.092  | Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan<br>Sosialisasi Standar<br>Operasional<br>Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | 3 laporan           | 2.227.481.376 |  |
| 12.5 | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara            | 4 set               | 849.442.129    | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara               | 4 set               | 715.621.002   |  |



| 13   | Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | Laporan Pengaturan Lalu<br>Lintas   | 4 laporan | 12.376.587.600 | Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | Laporan Pengaturan Lalu<br>Lintas   | 4 laporan | 1.120.000.000 |  |
|------|---|---|-----------|----------------|---|---|-----------|---------------|--|
| 13.1 | Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>Untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten / Kota  | Jumlah Laporan Penataan<br>Manajemen dan Rekayasa<br>Lalu Lintas untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota | 4 laporan | 200.000.000    | Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten /<br>Kota  | Jumlah Laporan Penataan<br>Manajemen dan Rekayasa<br>Lalu Lintas untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota | 4 laporan | 620.000.000   |  |
| 13.2 | Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Forum<br>Lalu Lintas dan Angkutan<br>Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota        | 4 laporan | 615.000.000    | Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Forum<br>Lalu Lintas dan Angkutan<br>Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota        | 4 laporan | 500.000.000   |  |

| 14   | Audit dan Inspeksi<br>Keselamatan LLAJ di<br>Jalan  | Laporan Pengendalian<br>disiplin pengoperasian<br>angkutan di jalan raya   | 4 laporan    | 6.264.000.029 | Audit dan Inspeksi<br>Keselamatan LLAJ di<br>Jalan  | Laporan Pengendalian<br>disiplin pengoperasian<br>angkutan di jalan raya   | 4 laporan | 17.934.370.248 |
|------|---|--|--------------|---------------|---|--|-----------|----------------|
| 14.1 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit<br>dan Pemantauan<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan<br>Kompetensi Pengemudi<br>Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan<br>Kompetensi Pengemudi<br>Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | 4<br>laporan | 2.185.371.980 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 laporan | 15.314.106.248 |
| 14.2 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit<br>dan Pemantauan Sistem<br>Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan<br>Angkutan Umum  | Jumlah Laporan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Sistem Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan<br>Angkutan Umum  | 4 laporan    | 4.078.628.049 | Pelaksanaan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Sistem<br>Manajemen Keselamatan<br>Perusahaan Angkutan<br>Umum                         | Jumlah Laporan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Sistem Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan<br>Angkutan Umum                            | 4 laporan | 2.620.264.000  |

| 15   | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota           | Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan<br>Angkutan Massal Bus<br>Trans Metro Bandung<br>(TMB), dan Bus<br>Sekolah   | 9 koridor    | 32.777.010.070  | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar<br>Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Angkutan<br>Massal Bus Trans Metro<br>Bandung (TMB), dan<br>Bus Sekolah  | 9 koridor    | 20.952.307.603  |  |
|------|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|--|
| 15.1 | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota           | Jumlah armada angkutan<br>umum untuk Jasa<br>Angkutan orang dan/atau<br>barang antar kota<br>dalam 1 (satu)<br>Kabupaten/Kota                            | 28 unit      | 32.592.510.070  | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar<br>Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Jumlah armada angkutan<br>umum untuk Jasa<br>Angkutan orang dan/atau<br>barang antar kota<br>dalam 1 (satu)<br>Kabupaten/Kota                            | 28 unit      | 20.602.307.603  |  |
| 15.2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3<br>Iaporan | 150.000.000     | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3<br>laporan | 350.000.000     |  |
|      |   | JUMLAH TOTAL   |              | 244.283.241.535 |   | JUMLAH TOTAL   |              | 263.650.089.059 |  |



### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung banyak menerima masukan / usulan baik dari masyarakat luas pada umumnya maupun dari kalangan tertentu pemangku kepentingan. Usulan dan masukan berbagai sumber tersebut diperoleh baik dari saluran resmi berupa musrenbang maupun disampaikan langsung/tidak langsung melalui berbagai media (surat resmi, surat kabar maupun kunjungan).

Dari beberapa usulan dan masukan tersebut ada beberapa diantaranya yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti pembuatan zebra cross, jembatan penyeberangan orang, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penataan terminal, penyediaan fasilitas halte bus dan sebagainya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



### Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bandung

# Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

| No  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Lokasi                   | Indikator Kinerja                          | Besaran /<br>Volume | Catatan |
|-----|---|--------------------------|--|---------------------|---------|
| (1) | (2)   | (3)                      | (4)  | (5)                 | (6)     |
|     |   |                          |  |                     |         |
| ı   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  |                          |  |                     |         |
|     | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota |                          |  |                     |         |
|     |   |                          | Terpasangnya PJU Reses                     | 88                  |         |
|     |   |                          | Terpasangnya PJL Reses                     | 742                 |         |
|     |   |                          | Terpasangnya Cermin<br>Tikungan Reses      | 18                  |         |
|     | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota          | Tersebar di Kota Bandung | Terpasangnya PJU<br>Musrenbang             | 413                 |         |
|     |   |                          | Terpasangnya PJL Musrenbang                | 3364                |         |
|     |   |                          | Terpasangnya Cermin<br>Tikungan Musrenbang | 372                 |         |
|     |   |                          | Terpasangnya Warning Light<br>Musrenbang   | 33                  |         |
|     |   |                          |  |                     |         |



#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

emerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mencanangkan program keselamatan transportasi yang mana hal ini telah direspon oleh Pemerintah Kota Bandung salah satunya melalui

Dinas Perhubungan. Adapun implementasi program keselamatan transportasi meliputi kelayakan pengoperasian sarana transportasi (baru mencakup kendaraan umum), ketersedian rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang memadai.

Salah satu faktor keselamatan transportasi yaitu kelaikan kendaraan bermotor, hal ini telah diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui uji berkala / KIR bagi kendaraan wajib uji yang terdiri dari kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang (untuk kendaraan pribadi plat hitam belum ada payung hukumnya). Untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini memerlukan beberapa instrumen yang tediri dari :

- a) Balai pengujian kendaraan bermotor
  - Untuk balai pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengantisipasi dengan membangun gedung pengujian kendaraan bermotor yang terletak di Gede bage setelah selama ini menumpang di area milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Laswi.
- b) Peralatan pengujian kendaraan bermotor
  - Untuk pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor secara bertahap telah diupayakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, secara rutin / berkala peralatan uji tersebut dipelihara dan dikalibrasi ulang agar menghasilkan pengujian kendaraan bermotor yang lebih presisi.



c) Kelengkapan bukti hasil pengujian kendaraan bermotor Sebagai bukti bahwa kendaraan wajib uji telah lulus uji dan layak beroperasi maka diberikan kelengkapan hasil uji yaitu buku uji /KIR, tanda samping berupa stiker lengkap dengan data kendaraan dan masa berlaku uji, dan tanda uji berupa segel yang dipasang di badan kendaraan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya kelayak hunian kota aspek transportasi serta Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu : Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan serta Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.



#### **BAB IV**

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025 ini mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kota Bandung.

Untuk tahun 2025 ini Dinas Perhubungan Kota Bandung merencanakan 2 program 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 263.650.089.059,- yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:



### Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bandung

Nama PD: Dinas Perhubungan Kota Bandung

|         | Urusan / Bidang Urusan  | Indikator Kinerja                                   |                 | Rencana                      | Tahun 2025                        |                | Catatan | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2026 |                                   |  |
|---------|---|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| KODE    | Pemerintahan Daerah<br>dan Program/Kegiatan /<br>Sub kegiatan                   | Program/Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan                  | Lokasi          | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana<br>/Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana | Penting | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana<br>/Pagu Indikatif |  |
| 1       | 2   | 3   | 4               | 5                            | 6                                 | 7              | 8       | 9                                    | 10                                |  |
| 2 2 15  | Urusan Wajib<br>bukan pelayaan<br>Dasar<br>Urusan Wajib<br>Perhubungan          |   |                 |                              |                                   |                |         |                                      |                                   |  |
| 2 15 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran | Kota<br>Bandung | 100%                         | 99.359.964.652                    | APBD           |         | 100%                                 | 109.295.961.118                   |  |
| 2 15 01 | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah     |                 | 5 Laporan                    | 450.000.000                       | APBD           |         | 5 Laporan                            | 495.000.000                       |  |

| 2 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah  | 5 Laporan          | 450.000.000    | APBD | 5 Laporan              | 495.000.000    |
|---|---|----|----|---|--|--------------------|----------------|------|------------------------|----------------|
| 2 | 2 | 02 |    | Kegiatan<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | Laporan Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN   | 12 Laporan         | 43.664.950.785 | APBD | 12<br>Laporan          | 48.031.445.864 |
| 2 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | 260<br>orang/bulan | 43.664.950.785 | APBD | 260<br>orang/bul<br>an | 48.031.445.864 |
| 2 | 2 | 05 |    | Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                  | Laporan administrasi<br>kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                      | 12<br>Laporan      | 1.891.908.354  | APBD | 12<br>Laporan          | 2.081.099.189  |
| 2 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    | 3 paket            | 555.290.254    | APBD | 3 paket                | 610.819.279    |
| 2 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan | 250 orang          | 1.336.618.100  | APBD | 250 orang              | 1.470.279.910  |
| 2 | 2 | 06 |    | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                            | Laporan penyediaan<br>administrasi umum perangkat<br>daerah                                  | 12 laporan         | 4.334.940.835  | APBD | 12 laporan             | 4.768.434.919  |
| 2 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  | 2 paket            | 149.846.850    | APBD | 2 paket                | 164.831.535    |

| 2 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                  | 4 paket    | 2.392.342.937 | APBD | 4 paket      | 2.631.577.231 |
|---|---|----|----|---|---|------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                              | 12 paket   | 839.314.200   | APBD | 12 paket     | 923.245.620   |
| 2 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     | 3 paket    | 324.671.248   | APBD | 3 paket      | 357.138.373   |
| 2 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang- Undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan | 2 dokumen  | 223.096.000   | APBD | 2<br>dokumen | 245.405.600   |
| 2 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi                                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          | 12 laporan | 405.669.600   | APBD | 12 laporan   | 446.236.560   |
| 2 | 2 | 07 |    | Kegatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Laporan Pengadaaan barang<br>milik daerah penunjang<br>urusan Pemerintah daerah       | 12 laporan | 621.947.358   | APBD | 12 laporan   | 684.142.094   |
| 2 | 2 | 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                         | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan           | 3 unit     | 68.376.000    | APBD | 3 unit       | 75.213.600    |
| 2 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan   | 3 paket    | 553.571.358   | APBD | 3 paket      | 608.928.494   |
| ı |   |    |    |   |   |            |               |      |              |               |

| 2 | 2 | 80 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Laporan penyediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah                                       | 12 laporan | 7.870.146.778 | APBD | 12 laporan | 8.657.161.456 |
|---|---|----|----|---|--|------------|---------------|------|------------|---------------|
| 2 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | 12 laporan | 9.300.000     | APBD | 12 laporan | 10.230.000    |
| 2 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan     | 12 Iaporan | 2.881.836.875 | APBD | 12 Iaporan | 3.170.020.563 |
| 2 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                          | 12 laporan | 4.979.009.903 | APBD | 12 Iaporan | 5.476.910.893 |
| 2 | 2 | 09 |    | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Laporan pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                   | 12 laporan | 6.120.999.177 | APBD | 12 laporan | 6.733.099.095 |
| 2 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 154 unit   | 4.552.905.302 | APBD | 154 unit   | 5.008.195.852 |
| 2 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                      | 3 unit     | 1.037.710.660 | APBD | 3 unit     | 1.141.481.726 |



| 2 | 2 | 09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 261 unit     | 530.383.197     | APBD          | 261 unit     | 583.421.517     |
|---|---|----|----|---|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2 | 2 | 10 |    | Kegiatan Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 2 unit kerja | 34.405.071.365  | APBD          | 2 unit kerja | 37.845.578.502  |
| 2 | 2 | 10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD<br>(Angkutan)   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 1 unit kerja | 7.000.000.000   | APBD/<br>BLUD | 1 unit kerja | 7.700.000.000   |
| 2 | 2 | 10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD (Parkir)  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   | 1 unit kerja | 27.405.071.365  | BLUD          | 1 unit kerja | 30.145.578.502  |
| 2 | 2 |    |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase Penurunan<br>aspek Penyebab<br>Kemacetan Urusan<br>Perhubungan  | 6,34%        | 164 200 124 407 | APBD          | 4,22%        | 100 710 126 040 |
|   |   |    |    |   | Persentase peningkatan<br>Pengguna Angkutan Umum   | 21,985%      | 164.290.124.407 | APBD          | 22,235%      | 180.719.136.848 |



| 2 | 2 | 01 |    | Kegiatan Penetapan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan Evauasi  | 16 dokumen | 3.759.331.220   | APBD | 16 dokumen | 4.135.264.342   |
|---|---|----|----|--|--|------------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 2 | 2 | 01 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>penyelenggaraan dan<br>pengukuan kinerja bidang<br>perhubungan | 16 dokumen | 3.759.331.220   | APBD | 16 dokumen | 4.135.264.342   |
| 2 | 2 | 02 |    | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan Di Jalan<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah perlengkapan jalan<br>dan prasarana jalan yang<br>tersedia                | 6.776 Unit | 105.268.835.329 | APBD | 6.776 Unit | 115.795.718.862 |
| 2 | 2 | 02 | 01 | Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                  | Jumlah Prasarana Jalan<br>di Jalan Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun              | 4.616 unit | 60.611.490.454  | APBD | 4.616 unit | 66.672.639.499  |
| 2 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia         | 2.160 unit | 14.748.218.908  | APBD | 2.160 unit | 16.223.040.799  |
| 2 | 2 | 02 | 03 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan                        | Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara              | 27 unit    | 23.896.077.805  | APBD | 27 unit    | 26.285.685.586  |
| 2 | 2 | 02 | 04 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan                     | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara           | 146 unit   | 6.013.048.162   | APBD | 146 unit   | 6.614.352.978   |
|   |   |    |    |  |  |            |                 |      |            |                 |

|   |   |    |    |  | 1  | ı                   |               | 1    | 1                   |               |
|---|---|----|----|--|--|---------------------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 2 | 2 | 03 |    | Kegiatan Pengelolaan<br>Terminal Penumpang Tipe<br>C                               | Jumlah Terminal<br>penumpang tipe C yang<br>dikelola (lokasi)  | 9 unit              | 7.000.000.000 | APBD | 9 unit              | 7.700.000.000 |
| 2 | 2 | 03 | 04 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Terminal (Fasilitas<br>Utama dan<br>Pendukung) | Jumlah Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama<br>dan Pendukung) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara | 9 unit              | 7.000.000.000 | APBD | 9 unit              | 7.700.000.000 |
| 2 |   | 2  |    | Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor  | Jumlah Kendaraan yang<br>diuji   | 66.000 unit         | 8.255.280.007 | APBD | 66.000 unit         | 9.080.808.008 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | Prasarana Pengujian<br>Berkala   | Jumlah sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Tersedia                | 4 set               | 772.988.994   | APBD | 4 set               | 850.287.893   |
| 2 | 2 | 05 |    | Registrasi Kendaraan Wajib   | Jumlah uji emisi gas buang<br>kendaraan bermotor   | 6 kali              | 86.648.905    | APBD | 6 kali              | 95.313.796    |
| 2 | 2 | 05 |    | Penyediaan Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor              | Jumlah kendaraan wajib uji   | 66.000<br>kendaraan | 4.452.539.730 | APBD | 66.000<br>kendaraan | 4.897.793.703 |

| 2 | 2 | 05 | 05 | Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor   | Jumlah Laporan<br>Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor      | 3 Iaporan | 2.227.481.376 | APBD | 3 Iaporan | 2.450.229.514 |
|---|---|----|----|---|---|-----------|---------------|------|-----------|---------------|
| 2 | 2 | 05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor             | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara                 | 4 set     | 715.621.002   | APBD | 4 set     | 787.183.102   |
| 2 | 2 | 06 |    | Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | Laporan Pengaturan<br>Lalu Lintas   | 4 laporan | 1.120.000.000 | APBD | 4 laporan | 1.232.000.000 |
| 2 | 2 | 06 | 01 | Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>Untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten / kota  | Jumlah Laporan<br>Penataan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | 4 laporan | 620.000.000   | APBD | 4 laporan | 550.000.000   |
| 2 | 2 | 06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Forum<br>Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota           | 4 Iaporan | 500.000.000   | APBD | 4 laporan | 682.000.000   |

| 2 | 2 | 08    | Audit dan Inspeksi<br>Keselamatan LLAJ di Jalan   | Laporan Pengendalian<br>disiplin pengoperasian<br>angkutan di jalan raya   | 4 laporan | 17.934.370.248 | APBD | 4 laporan | 19.727.807.273 |
|---|---|-------|---|--|-----------|----------------|------|-----------|----------------|
| 2 | 2 | 08 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit<br>dan Pemantauan<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan<br>Kompetensi Pengemudi<br>Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Iaporan | 15.314.106.248 | APBD | 4 Iaporan | 16.845.516.873 |
| 2 | 2 | 08 05 | Pelaksanaan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Sistem Manajemen<br>Keselamatan<br>Perusahaan Angkutan<br>Umum   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 4 Iaporan | 2.620.264.000  | APBD | 4 Iaporan | 2.882.290.400  |
| 2 | 2 | 09    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB), dan Bus Sekolah  | 9 koridor | 20.952.307.603 | APBD | 9 koridor | 23.047.538.363 |



| 2 2 09 01 | Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam<br>1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota           | Jumlah armada angkutan<br>umum untuk Jasa<br>Angkutan orang dan/atau<br>barang antar kota<br>dalam 1 (satu)<br>Kabupaten/Kota   | 28 unit   | 20.602.307.603  | APBD | 28 unit   | 22.662.538.363  |
|-----------|---|---|-----------|-----------------|------|-----------|-----------------|
| 2 2 09 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 3 laporan | 350.000.000     | APBD | 3 laporan | 385.000.000     |
|           | Jumlah Total  |   |           | 263.650.089.059 |      |           | 290.015.097.965 |



### BAB V PENUTUP

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan. Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Bandung serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk menciptakan Kota Bandung yang bermartabat.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang senantiasa mengedepankan



kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.

Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berkaitan dengan isu perencanaan berbasis gender, maka Dinas Perhubungan akan menganggarkannya pada kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal yang mana akan dipakai untuk perbaikan ruang tunggu penumpang khusus wanita. Sehingga secara pro aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif menghadapi isu strategis berbasis gender.